

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA
GEMPA DAN TSUNAMI PEMERINTAH KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh

**FAKHRIYANI
06193031**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2011

ABSTRAK

FAKHRIYANI, 06193031, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan judul skripsi: Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Pemerintah Kota Padang. Dibimbing oleh: Drs. Thamrin, M.si dan Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 117 halaman dengan referensi 3 buku teori, 3 buku metode, 2 jurnal, 1 skripsi, 7 web.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban pemerintah sebagai amanat dari UU no.24 tahun 2007 untuk selalu melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko bencana dalam bentuk mitigasi bencana dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap datangnya bencana. Dengan berbagai upaya yang berbentuk struktural dan non struktural tersebut diharapkan seluruh masyarakat yang bermukim di Padang, terutama di daerah rawan bencana tsunami dapat beraktifitas sebagaimana biasanya dengan dibekali pengetahuan tentang kewaspadaan bencana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan William Dunn, dan Manajemen Bencana Carter.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan implementasi kebijakan mitigasi bencana baik struktur dan non struktur masih menghadapi banyak kendala. Dalam hal ini Bapak Wali Kota Padang yaitu Fauzi Bahar yang sadar terhadap kekhawatiran dan kecemasan warganya untuk menghadapi bencana telah melakukan upaya dengan membangun *shelter* dan sosialisasi sadar bencana. Namun dalam pelaksanaannya mitigasi bencana membutuhkan dana dan pelaksana yang tidak hanya berasal dari personil pemerintah yaitu BPBD tetapi juga NGO dan LSM yang sadar bencana.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Mitigasi Bencana, gempa dan tsunami.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara historis, Indonesia merupakan wilayah sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Bencana¹ gempa dan tsunami besar yang terakhir terjadi pada akhir 2004 di Aceh lebih dari 150.000 orang meninggal dunia. Berdasarkan catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami². Diantaranya Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Selatan, Jawa Timur bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian pulau Sulawesi, Maluku Utara, Maluku Selatan, Irian Jaya, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan di Kalimantan Timur. Selain terletak tiga lempeng tektonik dunia, Indonesia juga merupakan jalur *The Pasific Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik, yaitu sebuah zona dimana sangat sering terjadi gempa bumi dan meletusnya gunung berapi.

¹ Bencana adalah berlangsungnya suatu kejadian bahaya yang luar biasa yang menimbulkan dampak pada komunitas-komunitas rentan dan mengakibatkan kerusakan, gangguan dan korban yang besar, serta membuat kehidupan komunitas yang terkena dampak tidak dapat berjalan dengan normal tanpa bantuan dari pihak luar.

² Pusat Data dan analisa Tempo. Indonesia rawan bencana.

http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2006/06/19/pol.20060619-01.id.html. diakses tanggal 10 November 2010 jam 13.00 wib.

Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi³. Dari ketiga tahapan periode tersebut mitigasi diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.⁴ Kedua periode tanggap darurat diartikan sebagai kecepatan dalam pemberian bantuan saat terjadi bencana di suatu wilayah. Ketiga rehabilitasi-rekonstruksi yaitu membangun kembali kawasan yang rusak akibat bencana dengan memperhatikan penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

Adanya ketentuan untuk melaksanakan mitigasi bencana, sebagai Instansi yang berwenang melaksanakan pengendalian bencana secara nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)⁵. BNPB berwenang merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan program yang direncanakan BNPB berdasarkan Peraturan Kepala BNPB no. 4 tahun 2008⁶ tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana, sedangkan yang

³ UU no. 24 tahun 2007 pasal 33 tentang penanggulangan bencana.

⁴ Dr. Ir. Agus Rachmat. Dalam artikel *Manajemen dan mitigasi bencana*. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat.

⁵ Rangkaian bencana yang dialami Indonesia khususnya sejak tsunami Aceh tahun 2004 pemerintah memperbaiki peraturan PP No. 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas-PB). Kemudian DPR mengembangkan kelembagaan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam UU tersebut pasal 14 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas-PB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggantikan Satkorlak dan Satlak di daerah.

⁶ Peraturan Kepala BNPB no. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana.

bertanggung jawab di Pemerintah kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)⁷.

Walaupun bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, dalam fungsi BPBD dan BPBD Kota Padang upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan tahan gempa seperti *shelter*, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktur, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah dalam bentuk peta daerah rawan bencana, relokasi daerah rawan bencana, tata ruang/tata guna lahan dan informasi publik atau penyuluhan sadar bencana⁸.

Setelah adanya bencana gempa pada tanggal 30 September lalu, Kota Padang mengalami kerusakan sarana dan prasarana yang tidak sedikit yaitu sekitar 22 Trilyun Rupiah, kemudian ditambah korban jiwa meninggal 383 orang⁹. Pemerintah Kota Padang telah merencanakan Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang sebagai 8 (delapan) pokok Kebijakan yaitu :

1. Memindahkan Pusat Pemerintahan Kota Padang
2. Revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Satelit
3. Re-organisasi Jaringan Transportasi
4. Menata Kawasan Pusat Kota Lama

⁷ BPBD dibentuk berdasarkan UU no. 22 tahun 2007 dan di Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Perda no. 18 tahun 2008.

⁸ Dokumen Dinas Tata Ruang Laut. Mitigasi Pesisir.

⁹ Dokumen Bappeda Kota Padang. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Oktober 2010.

5. Memulihkan Sarana Kesehatan & Pendidikan
6. Memulihkan Rumah Masyarakat & Pemukiman
7. Memulihkan Dini Mental Masyarakat
8. Revisi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Sebagai salah satu daerah rawan bencana gempa dan tsunami, Pemerintah Kota Padang bersama BPBD selama satu tahun ini telah berkordinasi dengan berbagai LSM setingkat internasional dan daerah dalam bentuk upaya mengurangi resiko bencana. Diantara program-program yang direncanakan BPBD untuk mitigasi bencana tersebut adalah¹⁰:

1. *Buoy Tsunami Early warning system* atau sirine pengaturan dini tsunami bekerjasama dengan GTZ.
2. Pembuatan peta evakuasi dini tsunami bekerjasama dengan PUSDAOP (Pusat Pengendali Operasional).
3. Pembuatan pembentukan kelompok siaga bencana yang dibentuk oleh Mercy Corps.
4. Pelatihan Pemetaan dan GIS (*Geografis Information System*).
5. Pembuatan Kurikulum di sekolah-sekolah mengenai pembelajaran pengurangan resiko bencana.
6. Pembuatan *shelter* yaitu tempat evakuasi saat terjadi tsunami.
7. Pembuatan bukit buatan yang akan dilaksanakan di daerah Universitas Negeri Padang oleh LSM Geo Hazard.
8. Pembentukan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan KSBS (Kelompok Siaga Bencana Sekolah sebagai bentuk sosialisasi.

Baik sebagai Pokok Kebijakan dan program yang telah direncanakan BPBD dapat dikelompokkan sebagai mitigasi struktur dan non struktur. Salah satu kebijakan baru yang direncanakan pemerintah dari pokok kebijakan pendidikan adalah *shelter*. Bangunan *shelter* adalah fasilitas umum yang apabila terjadi bencana tsunami atau bencana yang lain digunakan untuk evakuasi pengungsi dan tempat pendaratan helikopter¹¹. Syarat bangunan *shelter* adalah bangunan

¹⁰ Febrizamsi, wawancara dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2010 pukul 10.00-11.30 wib pada masa survei awal.

¹¹ PT. Tata Guna Patria, Laporan Akhir. *Detail Desain Shelter untuk mitigasi tsunami*.

bertingkat tahan gempa, tahan tsunami dan bisa menampung banyak orang¹². Diharapkan bangunan *shelter* mempunyai fungsi sekunder saat tidak terjadi bencana, selain mempunyai fungsi utama sebagai *shelter* untuk mitigasi tsunami.

Dalam rencana pembangunan itu, Pemerintah Kota Padang telah menyelesaikan pembangunan satu shelter multifungsi dari seratus *shelter* yang direncanakan. Satu *shelter* yang selesai dibangun itu merupakan gedung SMA Negeri 1 Padang yang baru dibangun di daerah Belanti. Sebagai bentuk pembangunan kembali prasarana dan sarana pendidikan sekolah yang rusak dan untuk sekolah dekat kawasan pantai dirancang untuk berfungsi sebagai bangunan evakuasi tinggi *shelter*.

Dengan rencana yang telah direncanakan oleh BNPB dan BPBD berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan di BPBD Padang mengatakan bahwa:

“BPBD yang ada di kota Padang baru terbentuk tahun 2008 dan baru berjalan tahun 2009, telah bekerjasama dengan Mercy Corps, Kogami, UNDP, Minang Geografis, World Vision Indonesia dan MAPALA. Tahun ini setelah gempa 30 September 2009 telah merencanakan berbagai rencana sebagai mitigasi yaitu program rencana pembuatan penanggulangan bencana, rencana aksi dengan bekerjasama dengan kogami, rencana kontingensi yaitu pembuatan kurikulum untuk sekolah-sekolah mengenai pengurangan resiko bencana.”¹³

Dari wawancara tersebut, walaupun BPBD telah berperan secara aktif dengan program-programnya, akan tetapi mengetahui resiko bencana, menjadi keharusan agar saat muncul bencana itu bisa dikurangi. Sehingga manusia yang

¹² <http://www.tribunnews.com/2010/08/05/padang-lebih-siap-hadapi-gempa-dan-tsunami>. Padang lebih siap hadapi gempa dan tsunami. diakses tanggal 15 September 2010 pukul 11.30 wib.

¹³ Febrizamsi, Staff BPBD bagian kesiapsiagaan bencana. Pada tanggal 8 Oktober 2010 pukul 10.00-11.30 wib.

tinggal, rumah-rumah, tempat bekerja dapat diselamatkan setelah mengenali resiko bencana ini. Dengan adanya *shelter* dan sosialisasi sadar gempa masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk pergi keluar daerah karena kondisi kota Padang yang tidak stabil ketika terjadinya bencana. Walaupun peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari, tetapi yang dapat dilakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta maupun lingkungan. Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana yang terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Sebagai daerah yang terletak di daerah rawan bencana, sudah seharusnya memiliki kebijakan, strategi, perencanaan atau program-program yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana. Karena kesadaran dan upaya ini dinilai sangat penting untuk mengurangi korban jiwa dan bangunan di kota Padang.

Persiapan mitigasi kota Padang menghadapi bencana ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak dari dalam negeri maupun asing yaitu Geo Hazard, GTZ, KOGAMI, Jemari Sakato dan Mercy Corps. Disamping bentuk-bentuk sosialisasi yaitu Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan KSBS (Kelompok Siaga Bencana Sekolah) salah satu proyek yang telah berjalan yaitu pembangunan *shelter* SMA 1 Padang yang terletak di kecamatan Padang Utara

dengan bekerjasama pemerintah Kota dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Internasional Indonesia yang berasal dari Taiwan¹⁴.

Seluruh usaha pemerintah kota Padang dan BPBD tersebut menjadi suatu proses yang berkesinambungan karena penanganan bencana tiap-tiap daerah, membutuhkan siklus manajemen yang tidak boleh terhambat kondisi birokrasi¹⁵. Oleh karena itu untuk menghindari kejenuhan masyarakat pada masa tidak ada bencana maka perlu didukung oleh kebijakan serta komitmen dari eksekutif pemerintah secara nyata, untuk perwujudan semua kebijakan yang telah terencana sehingga selalu ada aktifitas dimasa tidak ada bencana. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mitigasi diantaranya adalah tingginya dana¹⁶ yang diperlukan, proses pemahaman mitigasi oleh masyarakat memerlukan waktu yang lama dan jika kurangnya dukungan politis dari eksekutif dapat menghambat proses mitigasi tersebut¹⁷.

Walaupun kendala pelaksanaan mitigasi yaitu dana yang cukup tinggi terutama pembangunan *shelter* ini. Adanya unsur ketidaktahuan, kemiskinan dari masyarakat¹⁸ menjadi faktor sulitnya menerapkan pengendalian atau pengawasan yang tegas, bencana gempa pernah menimbulkan korban jiwa serta kerugian yang besar di Padang, sudah seharusnya mitigasi bencana gempa dan tsunami dapat

¹⁴ Sekolah Tahan Gempa 39 Milyar di bangun oleh Yayasan Tzu Chi. program mitigasi/index.php.htm. diakses tanggal 2 Desember 2010 jam 11.00 wib.

¹⁵ W. Nick Carter, a disaster manager's handbook (asian development bank, 1991) dalam modul Eko Teguh Paripurno manajemen bencana seputar beberapa bencana di Indonesia.

¹⁶ anggaran mitigasi bencana saat ini hanya senilai Rp15 miliar per tahun. Opini. Sutan Pangeran. Mitigasi Bencana Alam Kedodoran Kurang Dana.htm

¹⁷ Hendro Wartatmo. Artikel. Kesiagaan dan respon akut sektor kesehatan pada penanggulangan bencana *preparedness and acute responsof health sector in disaster relief*.

¹⁸ Abdul Alim Salam. Pengurus Ikatan Ahli Perencana Abdul Alim Salam. Dialog Tata Ruang Bersama Djen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum di Radio Trijaya FM Jakarta <http://birohukum.pu.go.id/eforum/posting.php?view=7>. Menata Ruang di Kawasan Rawan Bencana. Rolly MB. Artikel diakses tgl 15 September 2010 pukul 13.00 wib.

dipahami oleh pemerintah dan masyarakat. Menanamkan rasa sadar bencana untuk lingkungan fisik dan pemberian pelatihan kepada masyarakat saat ataupun sebelum bencana datang dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan pemahaman tentang mitigasi bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh semua orang baik pemerintah dan masyarakat. Dengan mitigasi, seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana dapat dipersiapkan.

Untuk meningkatkan pemahaman akan bencana dan mitigasinya sebagai masalah pembangunan daerah yang masih harus diatasi, berasal dari perubahan pandangan lama yang telah ada bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Program pembangunan tidak dengan sendirinya mengurangi kerentanan terhadap bahaya alam. Sebaliknya, program pembangunan bangunan-bangunan baru di daerah tanpa disadari dapat melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang telah ada, terkadang dengan konsekuensi yang tragis. Peningkatan pemahaman ini berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan bencana. Kemudian seperti diketahui bahwa kehilangan jiwa dan kerusakan yang terjadi adalah ketidaktahuan terhadap resiko dan kemungkinan hilangnya kontak pada saat terjadi bencana, termasuk yang diakibatkan oleh bahaya alam. Pemahaman akan hal ini telah mendorong adanya perhatian yang lebih besar pada analisis bentuk-bentuk dan penyebab mendasar kerentanan dan kegiatan-kegiatan terkait yang

dapat memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bahaya melalui mitigasi struktur atau non struktur¹⁹.

Karena pentingnya mitigasi bencana, untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih serius lagi dari pemerintah Kota Padang, masyarakat dan pihak-pihak atau stakeholder lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sehingga korban dalam bencana khususnya gempa dan tsunami pada waktu bencana dapat dikurangi dan semua potensi dan pengembangan dari pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik. Maka dengan hal itu, adanya kebijakan dan kerjasama mitigasi bencana yang optimal dari pemerintah dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan disemua aspek pendukung kehidupan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat bahwa bencana terutama gempa bumi dan tsunami di Kota Padang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi kembali. Dibutuhkannya kesiapan dan persiapan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan mitigasi yang lebih efektif dan efisien sebagai tindakan sebelum terjadinya bencana sangat perlu dilakukan. Disamping perlunya pemahaman dalam pemilihan lokasi tempat tinggal yang aman dan menghindari resiko

¹⁹ Charlotte Banson dan John Twigg. *Perangkat untuk Mengarusutamakan Pengurangan Resiko Bencana* edisi bahasa Indonesia. Hlmn 7.

bencana. Untuk mewujudkan mitigasi bencana, unsur masyarakat yang sadar bencana, tertib, dan menaati aturan memegang peranan penting.

Dengan mengingat proses ini memiliki peran yang penting dalam usaha meminimalisir korban jiwa dan harta benda maka persiapan dan rencana yang berbentuk struktur dan nonstruktur ini sangat penting untuk dibuat dan dilaksanakan. Sehingga sebagai daerah yang rawan bencana akan meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat dan pemerintah untuk senantiasa siaga bencana. Aspek-aspek yang akan terlibat dalam program mitigasi bencana tidak hanya satu badan yaitu BPBD sebagai badan yang bertindak dari pemerintah kota tetapi akan melibatkan aspek tata ruang dan aspek sosial agar tujuan dari pemerintah dan masyarakat siaga bencana dapat tercapai dalam menangani bencana nantinya. Dengan pentingnya mitigasi bencana di kota Padang terhadap kondisi kota Padang yang rawan bencana maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah *“Bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana Pemerintah Kota Padang?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan mitigasi bencana struktur pemerintah kota padang khususnya pembangunan *shelter*.
2. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan mitigasi bencana non struktur pemerintah kota padang yaitu pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana..

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis dapat memberikan masukan kepada akademisi, pengamat atau pemerhati masalah manajemen bencana. Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah kota Padang.

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Kebijakan Mitigasi bencana Pemerintah Kota Padang

Tahapan mitigasi bencana adalah bagian dari Manajemen bencana sebagai usaha seluruh komponen dari masyarakat baik pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda. Dalam siklus manajemen bencana terdapat tiga komponen yang dilakukan yaitu kegiatan prabencana, tanggap darurat saat terjadi bencana dan kegiatan pasca bencana. Jika selama ini manajemen bencana lebih menitikberatkan pada aspek penanganan tanggap darurat dan pasca bencana yang ternyata terdapat banyak kelemahan, maka ke depannya manajemen bencana lebih menitikberatkan kegiatan prabencana yaitu kegiatan mitigasi bencana dalam kerangka mengurangi risiko dan dampak bencana. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Deddi Ajir sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang yaitu :

“mitigasi bencana sebagai tahapan manajemen bencana merupakan aksi kesiapsiagaan setelah masa tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh aspek masyarakat dalam situasi bencana dan mitigasi bencana merupakan satu kesatuan yang utuh, hendaknya seluruh stakeholder memiliki rasa tanggung jawab dalam masa mitigasi bencana ini.”⁵⁰

Jawaban yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD hampir senada dengan yang diucapkan oleh Bapak Yadrison SH. M.Si Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD :

⁵⁰ Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kota Padang Bapak Deddi Ajir pada tanggal 14 Desember 2010

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Usaha pemerintah Kota Padang untuk membangun proyek dan program mitigasi bencana di Kota Padang sudah menampakkan hasil baik seperti proyek mitigasi struktur dalam bentuk shelter dan non struktur dalam bentuk *trauma healing* dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih waspada dan siap siaga terhadap ancaman gempa dan tsunami di Kota Padang. Walaupun untuk langkah awal, pemerintah Kota Padang mengalami kesulitan dana dan butuh bantuan untuk melaksanakan program-program yang ditujukan untuk masyarakat secara serentak. Seperti contohnya pembangunan *shelter* SMA 1 Padang yang megah dan pembangunannya yang relatif cepat dapat langsung digunakan hanya dalam jangka waktu kurang lebih 8 bulan. Pembangunan SMA 1 adalah kerjasama Pemerintah Kota Padang dengan salah satu yayasan dari Taiwan yang berinisiatif untuk menyumbangkan dananya untuk pembangunan sebuah sekolah. Dengan adanya shelter ini, masyarakat sekitar sekolah dapat memanfaatkan bangunan ini ketika ada ancaman gempa dan tsunami.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu peneliti berupaya untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa dan tsunamai Pemerintah Kota Padang. Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan dari teori William N. Dunn tentang menetapkan implementasi tindakan kebijakan yang memiliki 4 fungsi yaitu kesesuaian, pemeriksaan, eksplanasi dan akuntansi :

1. Kesesuaian *compliance*, dalam melaksanakan semua kegiatannya BPBD bertindak sesuai TUPOKSI yang mereka miliki. Sebagai tindakan yang mengarah terhadap mitigasi bencana segala upaya tersebut merujuk kepada UU no 24 tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB no 4 tahun 2008. Kemudian untuk pembangunan rekonstruksi rumah masyarakat hal ini mengarah kepada Peraturan Wali Kota Padang no. 19 tahun 2010.
2. Pemeriksaan *auditing* tindakan kebijakan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran seperti masyarakat dan kebijakan tersebut sudah berjalan, baik dari segi sosialisasi dan pembangunan *shelter*. *Shelter* yang telah ada berada di SMA N 1 Padang Lolong Belanti. Sedangkan sosialisasi telah ada seperti Kelompok Siaga Bencana untuk Masyarakat dan KSBS untuk kelompok Siaga Bencana Sekolah.
3. Akuntansi. *Monitoring* menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Dengan adanya sosialisasi dan gempa yang memang sering terjadi di Padang, masyarakat Padang sudah mulai mengetahui dan melaksanakan kegiatan mereka sebagai masyarakat siaga bencana. Baik evakuasi vertikal dan horizontal adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah yang telah didukung oleh masyarakat.
4. Penjelasan *Explanation*, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah Kota Padang mengalami kesulitan dana dan koordinasi yang baik apabila tidak

ada bantuan dari NGO untuk pelaksanaan sosialisasi. Dengan adanya peran yang saling mengisi dari NGO, masyarakat dan pemerintah kegiatan sosialisasi ini dapat dikatakan sukses dan dirasakan masyarakat dari segala lapisan dan pekerjaan. Dari yang paling penting yaitu sekolah-sekolah NGO Mercy Corps dan Kogami sudah memiliki program yang mantap dapat dilanjutkan oleh murid-murid dan warga masyarakat tersebut sebagai kegiatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan mereka terhadap bencana.

Apabila dilihat dari materi mitigasi bencana, persiapan Kota Padang untuk mengurangi resiko bencana telah terlihat baik dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana Kota Padang yaitu:

1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan pembangunan *shelter* dan menata kawasan pusat pemerintahan Kota Padang agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana.
2. Kelembagaan pemerintah dalam hal ini BPBD yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan.
3. Lembaga-lembaga non pemerintah (NGO) baik Internasional dan lokal yang berasal dari masyarakat seperti Mercy Corps, KOGAMI dan

Jemari Sakato yang sifatnya menangani kebencanaan dalam bentuk pembekalan masyarakat, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik.

4. Pelaksanaan program atau tindakan riil dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.

Koordinasi dari pihak dinas pendidikan tentang kurikulum siaga bencana adalah kekurangan yang ada untuk tahun 2010-2011 dalam penerapan siaga bencana bagi siswa sekolah. Kemudian kurangnya dana juga membatasi program sosialisasi yang ditujukan untuk sekolah-sekolah dan masyarakat. Bantuan dari pihak LSM lokal dan internasional seperti Mercy Corps, Kogami dan Jemari Sakato juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini dapat menggambarkan dengan kondisi kota Padang yang sering terkena gempa dan ancaman tsunami, masyarakat dalam hal ini telah mendapatkan perannya masing-masing untuk berupaya membekali diri untuk selalu siaga bencana.

6.2 Saran

Sebagai program pengurangan resiko korban jiwa dan harta benda. Diharapkan program dan proyek mitigasi bencana yang direncanakan dan telah terlaksana benar-benar tepat pada sasarannya, bukan untuk kepentingan tertentu. Kedepannya masyarakat Kota Padang dapat menikmati apakah *shelter* dan sosialisasi, simulasi gempa diseluruh wilayah Kota Padang. Kesadaran akan

kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan NGO-NGO tersebut dapat memberi manfaat untuk kehidupan sehari-hari masyarakat untuk tetap menjalankan kegiatannya dengan pengetahuan yang cukup tentang bencana gempa dan tsunami dengan kewaspadaan terhadap ancaman bencana tersebut.

Saran untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Keinginan pemerintah untuk terus melaksanakan mitigasi bencana pengurangan resiko bencana yang diterjemahkan baik dalam program pemerintah sendiri dan kerjasama dengan NGO atau LSM agar dapat tersosialisasi dan transparan terhadap masyarakat. Sehingga spekulasi-spekulasi negatif yang berkembang tentang dana dan program-program yang fiktif tidak menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana.
2. Untuk penelitian selanjutnya, Kebijakan mitigasi bencana ini dapat disorot dengan berbagai macam rumusan politik terhadap kebijakan, diantaranya rumusan kebijakan, analisis kebijakan. Untuk lebih memperbanyak pengetahuan tentang bencana ini, akan lebih baik apabila peneliti dapat ikut bergabung pada satu LSM atau NGO yang bergerak di bidang kebencanaan. Sehingga akan mengurangi kesulitan mencari data dan pengalaman.